

Tabel 7.5  
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019  
Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		K	Rp	
				K	Rp	K	Rp		Rp			
				K	Rp	K	Rp		Rp	K	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN											
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan	%	100	4.039.549.844,37		4.150.586.844,07		4.483.132.617,84		12.673.269.306,28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	%	100								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya	%	100								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target 90% (laporan)	Dokumen	10								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1. Persentase guru PAUD Formal yang memiliki kualifikasi S1/DIVtenaga kependidikan		60,9	37.648.456.848,15		38.683.317.625,37		41.782.632.077,77		118.114.406.551,29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Persentase guru SD yang memiliki kualifikasi S1/DIV	%	93								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Persentase guru SMP yang memiliki kualifikasi S1/DIV	%	95,81								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Persentase guru PAUD Formal yang memiliki sertifikat pendidik	%	24,57								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		5. Persentase guru SD yang memiliki sertifikat pendidik	%	46,31								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		6. Persentase guru SMP yang memiliki sertifikat pendidik	%	49,9								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		7. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SD Nilai diatas 70	%	7,38								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		8. Persentase Hasil Uji Kompetensi guru SMP Nilai diatas 70	%	30,94								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		9. Persentase guru SD yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran	%	20,16							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		10. Persentase guru SMP yang memanfaatkan TIK dalam pembelajaran	%	13,24							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1. Angka Partisipasi Kasar PAUD Formal (0-6 tahun)		50,96 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Angka Partisipasi Kasar PAUD Non Formal (0-6 tahun)		10,15 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A		0,01							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B		5,75 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket C		9,50 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		6. Jumlah PAUD yang terakreditasi A		21 lembaga							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		7. Jumlah Lembaga Pendidikan Non Formal yang terakreditasi		20 lembaga							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		8. Jumlah dokumen kurikulum PAUD		1 dokumen							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		9. Jumlah kerjasama dalam melaksanakan program holistik integratif untuk PAUD		2 kerjasama							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		10. Jumlah dokumen kurikulum PNF		1 dokumen							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		11. Angka Kelulusan Paket A	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		12. Angka Kelulusan Paket B	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		13. Angka Kelulusan Paket C	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase sekolah penerima BOP	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Persentase sekolah penerima BOS	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar	%	100							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan		1,96 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		106,55 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SD		106,15 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		5. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		105,45 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		6. Angka Partisipasi Kasar (APK) Perempuan SMP		109,79 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		7. Angka Partisipasi Murni (APM) SD		88,25 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		8. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		77,50 %							DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

		9. Jumlah SD/MI yang terakreditasi A		48 sekolah								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		10. Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi A		17 sekolah								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		11. Rata-rata nilai USBN SD		69,10 point								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		12. Rata-rata nilai UN SMP		58,06 point							-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		13. Persentase Siswa SD miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	%	85							-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		14. Persentase Siswa SMP miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	%	85							-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		15. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SD Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional		8 prestasi							-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		16. Jumlah prestasi yang diperoleh siswa SMP Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional		12 prestasi							-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
<b>1.02</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>											
	<b>DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>											
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	3.765.212.277,92		3.868.708.432,36		4.178.670.056,45		11.812.590.766,74	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100							-	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	skor	75								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1. Persentase pelayanan rumah sakit yang bermutu	%	90	57.102.893.893,95		58.672.507.899,52		63.373.359.916,73		179.148.761.710,20	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Labkesda	%	35								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		3. Persentase Penduduk yang Memanfaatkan Puskesmas	%	30							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4. Persentase penduduk miskin yang dilayani sesuai standar	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1. Prevalensi stunting pada balita	%								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		2. Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada balita	%								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		3. persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4. Persentase kesehatan pelayanan ibu bersalin yang sesuai standar	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		5. Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		6. Persentase pelayanan kesehatan balit	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		7. Cakupan kunjungan bayi	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		8. Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		9. Cakupan kelurahan siaga aktif	%	80							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		10. Persentase siswa kelas I - IX mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		11. Persentase pemanfaatan media promosi	%								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		12. Cakupan Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat	%	61							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		13. Persentase TTU yang memenuhi persyaratan	%	81							DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		14. Persentase TPM yang memenuhi Persyaratan	%	81								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		15. Persentase puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan kerja dan olahraga	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		16. Perkiraan Angka Kesakitan DBD per 100.000 Penduduk	per 1.000 penduduk	49								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		17. Perkiraan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk	per 1.000 penduduk									DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		18. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		19. Persentase pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		20. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		21. Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar	%	23								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		22. Pelayanan kesehatan diabetes melitus sesuai standar	%	42,52								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		23. Pelayanan kesehatan pada usia produktif (15-59 th) mendapatkan skring kesehatan sesuai standar	%	22,5								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		24. Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE) ditanggulangi	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		25. persentas kelurahan universal child immunization (UCI)	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		26. persentase calon jemaah haji yang mendapatkan pemeriksaan	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		1. Cakupan Kota yang memberikan pelayanan kesehatan	%	80								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

		2. Cakupan SDM yang sesuai standar	%	3,87								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		3. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		4. Persentase sarana kesehatan yang memenuhi standar	%	55								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		5. Persentase PIRT yang memiliki izin eda	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		6. Cakupan pengelolaan fasilitas pelayanan kefarmasian dan perbekalan farmasi	%	100								DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase meningkatnya kapasitas SDM Kesehatan			103.225.265,71		106.062.666,96		114.560.427,15		323.848.359,82	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN				142.307.303,38		146.218.970,92		157.934.061,50		446.460.335,79	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				557.568.767,24		572.894.921,25		618.795.366,66		1.749.259.055,15	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
<b>1.03</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>											
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang dapat terpenuhi	%	100	9.562.507.200,84		9.825.356.317,71		10.612.565.655,09		30.000.429.173,64	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase sarana dan prasarana aparatur yang dapat disediakan / dipelihara	%	100								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	%	100								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dibuat selama 1 tahun	%	100								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1. Luas wilayah tergenang >2 kali setahun	%	40	15.790.280.201,42		16.224.315.033,39		17.524.210.108,32		49.538.805.343,13	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. persentase kawasan abrasi yang tertangani	%	40								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

		3. persentase titik genangan dan banjir yang tertangani	%	40								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				5.429.618.409,41		5.578.864.875,20		6.025.844.544,92		17.034.327.829,52	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				25.568.800.602,03		26.271.622.206,92		28.376.509.362,21		80.216.932.171,16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	1. Presentase jalan yang di rehabilitasi	%	40	1.610.511.976,73		1.654.780.874,20		1.787.362.219,17		5.052.655.070,10	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Panjang jalan baru	Km	20								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Persentase jaringan perpipaan air minum yang terpasang	%	20								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		4. Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat	%									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		5. Persentase jasa konstruksi yang tersertifikasi	%									DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Presentase jalan yang di rehabilitasi			35.740.380.265,23		36.722.792.847,20		39.665.029.697,36		112.128.202.809,79	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Panjang jalan baru										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Jalan Kota Kondisi Baik										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1. Jumlah RDTR yang tersusun	Dokumen	1	2.038.148.195,68		2.094.171.730,31		2.261.957.150,69		6.394.277.076,69	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Jumlah RTBL yang tersusun										DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		3. Persentase RTH publik wilayah perkotaan	Dokumen	13								DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN											
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	3.202.984.787,07		3.291.026.730,99		3.554.704.391,97		10.048.715.910,03	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100								DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

		Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	skor	12							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Capaian Pembangunan Fasilitas Umum di Kawasan Permukiman	%	100	11.901.196.709,70	12.228.330.481,12	13.208.066.546,06	37.337.593.736,88			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase tersedianya bantuan rehabilitasi rumah akibat bencana									DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Publik	%	100	6.062.768.822,43	6.229.418.990,35	6.728.521.174,24	19.020.708.987,02			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		Persentase Capaian Ketersediaan Rumah Layak Huni									DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1. Terciptanya Lingkungan Perumahan yang Sehat Di Kawasan Permukiman			8.905.678.365,04	9.150.472.919,87	9.883.610.476,52	27.939.761.761,43			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		2. Persentase Capaian Pembangunan PSU Di Lingkungan Perumahan	%	7							DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA										
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.156.535.980,19	1.188.326.226,68	1.283.535.140,36	3.628.397.347,24			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 100%	%	100							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100							SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase penegakan perda dan perkara	%	97	5.242.488.039,86	5.386.590.765,49	5.818.165.398,52	16.447.244.203,88			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2. meningkatnya penanganan penyidikan terhadap kasus pelanggaran perda									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		3. rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk									SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



		4. rasio Linmas per jumlah 10.000 penduduk										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5. Angka gangguan keamanan dan ketertiban yang tertangani										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		6. persentase anggota linmas yang terlatih dalam penanganan gangguan kewan dan ketertiba										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.04	PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN	1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota 12 bulan	%	100	6.778.199.945,42		6.964.515.503,90		7.522.513.754,32		21.265.229.203,64	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2. persentase kelurahan memiliki kelompok kader siaga kebakaran										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		3. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran diatas 3000-5000 liter pada WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		4. Jumlah upaya peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran										SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		5. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah manajemen kebakaran (WMK)		13								SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>											
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhnya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	729.532.038,04		749.585.027,06		809.641.915,93		2.288.758.981,02	BPBD
		Persentase terpenuhnya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100								BPBD
		Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100								BPBD
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100								BPBD
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase dokumen kebencanaan yang tersedia	%	80	4.568.083.305		4.693.648.351		5.069.704.312		14.331.435.967,79	BPBD
		2. Persentase kelurahan siaga bencana	%	60	0,00		0,00		0,00		-	BPBD
		3. Perentase penanganan tanggap darurat	%	100	0,00		0,00		0,00		-	BPBD

[illegible]

2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA											
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA											DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	TPAK										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		TPAK perempuan										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Rasio penduduk yang bekerja										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Upah rata-rata per jam pekerja										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	%									DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	1. TPAK	%	68	471.081.528,48		484.030.367,22		522.810.968,39		1.477.922.864,09	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		2. TPAK perempuan	%	40								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		3. Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	60								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		4. Rasio penduduk yang bekerja	%	65								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		5. Angka sengketa pengusaha dan pekerja	kasus	55								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		6. Upah rata-rata per jam pekerja	ribu	17000								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		7. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	73								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan antara pekerja dan pengusaha										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Angka sengketa pengusaha dan pekerja										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb											
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya Upaya Pelayanan Administrasi Perkantoran	upaya	11	1.041.881.667,18		1.070.520.356,84		1.156.290.642,78		3.268.692.666,81	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana Aparatur	upaya	5								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen	6								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Score nilai KLA	score	60	997.203.670,60		1.024.614.275,23		1.106.706.557,54		3.128.524.503,38	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan bantuan										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tersedianya sistem data gender dan anak										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	persentase OPD yang terlibat dalam pencapaian status KLA									-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terlaksananya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus										Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN											
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN											
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.130.224.959		1.161.291.982		1.254.334.908		3.545.851.849,46	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

		Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur Prasarana Aparatur	%	100	0	0	0	0	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		persentase aparatur yang lulus diklat	%	100	0	0	0	0	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Persentasi Jumlah Laporan Yang terpenuhi	%	100	0	0	0	0	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1. Ketersediaan energi per kapita	kkal/kapita /hari	2.300	461.761.690,05	474.454.350,03	512.467.718,95	1.448.683.759,02		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		2. Ketersediaan protein per kapita	gr/kapita/ hari	63						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		3. Jumlah Cadangan Pangan	Ton	7,5						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		4. Konsumsi Energi Perkapita	kkal/kapita /hari	2.066						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		5. Konsumsi Protein Perkapita	gr/kapita/ hari	66						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		6. Persentase Pangan yang aman konsumsi	%	100						DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Kota Pangkalpinang	%					-		DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan yang aman dikonsumsi	%							DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
<b>2.10</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>									
	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT</b>									
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	%	100	19.298.980.643,50	19.829.460.768,86	21.418.200.776,62	60.546.642.188,98		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
<b>2.11</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>									
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>									
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Presentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	860.091.955,41	883.733.706,07	954.538.611,53	2.698.364.273,01		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Presentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	404.069.310,53	415.176.153,03	448.440.142,02	1.267.685.605,58		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	%	100	116.011.168,03	119.200.021,38	128.750.348,80	363.961.538,21		DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		Presentase jumlah laporan yang terpenuhinya	%	100	25.149.883,91		25.841.190,56		27.911.591,45		78.902.665,92	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%									DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Terlaksananya Program Perencanaan Lingkungan Hidup										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan	%	31	2.817.513.252,97		2.894.959.560,17		3.126.904.247,31		8.839.377.060,45	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		2. Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan	%	100	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Nilai untuk mencapai Adipura	nilai	76	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		4. Indeks Kualitas LH	indeks	75	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		5. Indeks Kualitas Air	indeks	63	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		6. Indeks Kualitas udara	indeks	80	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		7. Indeks tutupan lahan	indeks	0,3	0,00		0,00		0,00		-	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)											DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Presentase pembinaan dan pengawasan ketaatan izin lingkungan										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Nilai untuk mencapai Adipura										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Peresentase peningkatan penyelesaian pengaduan masyarat terhadap izin lingkungan										DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Presentase sampah terkelola dengan metode 3R	%	12	17.909.105.365,27		18.401.381.337,50		19.875.703.361,16		56.186.190.063,93	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

		2. Persentase penanganan sampah perkotaan	%	75								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		3. Persentase sampah yang terangkut ke TPA	%	65								DINAS LINGKUNGAN HIDUP
												DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL											
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	784.602.316,41		806.169.047,99		870.759.458,92		2.461.530.823,32	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur	%	100								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase aparatur yang mendapat peningkatan kapasitas	%	100								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase laporan keuangan dan kinerja yang dibuat	%	100								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%									DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	1. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil	%	79	1.420.209.184,09		1.459.247.139,51		1.576.162.286,06		4.455.618.609,66	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		2. Persentase keserasian Database Kependudukan	%	94								DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio Penduduk Ber KTP persatuan Penduduk										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Kememilikan Kartu Keluarga										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Pernerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio Bayi Berakte Kelahiran per1000 penduduk										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Rasio Perkawinan yang tercatat di catatan sipil per 1000 penduduk										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		Cakupan Kepemilikan Akte Kematian										DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN										-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase keserasian database penduduk	%								-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA											
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA											
	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb											
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1. Cakupan Peserta KB Aktif			1.459.850.692,68		1.499.978.292,83		1.620.156.826,80		4.579.985.812,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		2. Contraceptive Prevalence Rate Moder	%	63,49								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
		3. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Jumlah	2,23								Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Contraceptive Prevalence Rate Modern									-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa			1.407.726.543,56		1.446.421.382,79		1.562.308.927,38		4.416.456.853,73	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kb
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN											
	DINAS PERHUBUNGAN											
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang tertangani	%	100	5.822.480.241,16		5.982.525.484,23		6.461.846.515,45		18.266.852.240,84	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi baik	%	100	0,00		0,00		0,00		-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Meningkatnya Aparatur yang Profesional dan Kompeten	%	100	0,00		0,00		0,00		-	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	0,00		0,00		0,00		-	DINAS PERHUBUNGAN



[illegible]

2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN											
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	1. Persentase Koperasi Aktif	%	40	197.090.104		202.507.612		218.732.559		618.330.276,13	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	10								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		%									DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan RAT	%									DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1. Persentase Pertumbuhan Pelaku Usaha Baru	%	100	72.369.430		74.358.682		80.316.313		227.044.425,58	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase peningkatan usaha kecil dan menengah (UKM)	%	3								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		3. Persentase usaha mikro dan kecil	%	34								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase UMi menjadi UK	%								-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL											
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA											DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	2.961.176.094,50		3.042.571.329,56		3.286.342.698,54		9.290.090.122,60	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		persentase meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	%	100								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL											DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. Jumlah upaya dalam meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi			389.627.774,15		400.337.655,38		432.412.781,23		1.222.378.210,76	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		2. Persentase realisasi Investasi	%	65								DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. Persentase perizinan yang diterbitkan	%	100	659.352.678,52		677.476.614,60		731.756.164,33		2.068.585.457,44	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase pelaksanaan Perijinan Tepat Waktu										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase realisasi pendapatan terhadap PAD										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan yang diterbitkan									-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan KPPT										DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase perizinan yang diterbitkan									-	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
<b>2.19</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>											
	<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>											<b>DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani			530.486.666,71		545.068.402,32		588.739.381,98		1.664.294.451,00	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik										DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

		Persentase meningkatnya aparaturnya yang profesional dan kompeten										DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan										DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah jenis upaya peningkatan peran serta kepemudaan			595.996.627,32		612.379.065,93		661.442.988,20		1.869.818.681,45	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1. Rasio prestasi pemuda di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	95	4.704.890.354,97		4.834.215.881,09		5.221.534.137,80		14.760.640.373,87	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		2. Rasio prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti	%	92	0,00		0,00		0,00		-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase pengembangan kapasitas kepramukaan										DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>2.20</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK</b>											
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	%	100	499.224.223,52		512.946.633,71		554.044.011,41		1.566.214.868,65	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
<b>2.21</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN</b>											
	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
2.21.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase OPD yang aktif dan update websitenya Persentase OPD yang memiliki dokumen/buku statistik sektoral Persentase pemanfaatan persandian dalam komunikasi antar OPD, serta antara pemerintah Kota dengan Pusat dan Provinsi	%		73.133.059,30		75.143.301,97		81.163.797,01		229.440.158,28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN											DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah kebudayaan yang dikembangkan dan dilindungi tingkat kota, provinsi dan nasional										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Jumlah kesenian tradisional yang dilindungi										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		Jumlah tempat pementasan seni budaya										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1. Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi	cagar budaya	36	2.423.179.839,83		2.489.786.919,70		2.689.269.101,10		7.602.235.860,63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		2. Jumlah Seni dan Budaya yang dilestarikan	buah	9								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		3. Jumlah Sejarah dan Tradisi yang dilestarikan	buah	11								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		4. Jumlah tempat pementasan seni budaya	buah	4								DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Cagar Budaya dan permuseuman yang dilindungi										DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN											
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN											DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	873.603.942,26		897.617.103,23		969.534.349,00		2.740.755.394,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100								DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja										DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan										DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	178.786	410.411.329,54		421.692.498,10		455.478.577,84		1.287.582.405,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

[illegible]

3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA											
	DINAS PARIWISATA											DINAS PARIWISATA
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan adminis	%	100	801.749.636,55		823.787.704,55		889.789.725,45		2.515.327.066,54	DINAS PARIWISATA
		Persentase sarana dan pras	%	100								DINAS PARIWISATA
		Persentase meningkatnya k	%	100								DINAS PARIWISATA
		Persentase ketepatan wakt	%	100								DINAS PARIWISATA
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase meningkatnya PAD sektor pariwisata	%	2,1	1.241.222.686,70		1.275.340.756,38		1.377.521.290,03		3.894.084.733,11	DINAS PARIWISATA
		Persentase destinasi wisata dengan sarana dan fasilitas publik yang tersedia										DINAS PARIWISATA
		Jumlah jenis upaya pengembangan kemitraan										DINAS PARIWISATA
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	2.423.255.204,29		2.489.864.355,75		2.689.352.741,33		7.602.472.301,37	DINAS PARIWISATA
		Persentase penyelenggaraan even dalam rangka mempromosikan potensi wisata daerah	%									DINAS PARIWISATA
		Jumlah jenis upaya pengembangan pemasaran pariwisata										DINAS PARIWISATA
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif									-	DINAS PARIWISATA
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN											
	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN											
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1. Jumlah produksi Jagung	Ton	60	1.398.782.525,27		1.437.231.516,08		1.552.382.766,87		4.388.396.808,23	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		2. Jumlah produksi Nanas	Ton	2.100								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		3. Jumlah produksi Jahe Merah	Ton	2								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		4. Jumlah produksi Cabe	Ton	17								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		5. Jumlah produksi Daging	Ton	5.278								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		6. Jumlah produksi Telur	Ton	140								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		7. Jumlah produksi Susu	Liter	132.613								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		8. Jumlah populasi ternak	Ekor	76.939								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		9. Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan	Ekor	1.600								DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Jumlah Sarana Pertanian										DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

[illegible]



3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN											
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	1. Persentase sarana prasarana perdagangan yang memiliki informasi perdagangan	%	20	11.026.062.576,15		11.329.141.125,51		12.236.833.975,53		34.592.037.677,20	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%		0,00		0,00		0,00		-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		3. Persentase pemilik UTP yang tertib niaga	%		0,00		0,00		0,00		-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana yang memiliki informasi perdagangan	%		0,00		0,00		0,00		-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar	%		0,00		0,00		0,00		-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah			0,00		0,00		0,00		-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Kontribusi sektor Perdagangan dalam PDRB;									-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN										-	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI											DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN											
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN											DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1. Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1.078.639.185,12		1.108.288.245,90		1.197.084.501,99		3.384.011.933,01	DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	%									DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		1. Terpenuhiya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100								DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN
		2. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%									DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN



		Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	100						-	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Peningkatan Kualitas Kelembagaan	%	100	19.285.719.804,73		19.815.835.423,20		21.403.483.765,78	60.505.038.993,72	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase meningkatnya kualitas pemahaman, pengamalan dan pembinaan kerukunan agama	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Rakyat	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase meningkatnya kerjasama daerah	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Meningkatnya Partisipasi masyarakat Dalam Membangun Desa									SEKRETARIAT DAERAH
		Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Kelembagaan									SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Meningkatnya Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	%	100	6.840.449.728,44		7.028.476.375,88		7.591.599.183,00	21.460.525.287,32	SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase peningkatan penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase Peningkatan Pengembangan BUMD, Perencanaan, Pengkajian, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentasenya Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kewirausahaan	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Informasi	%	100							SEKRETARIAT DAERAH
		Persentase pengembangan dan pembinaan lembaga ekonomi dan keuangan									SEKRETARIAT DAERAH
4.01.04	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase kelancaran pelayanan kedinasan KDH/WKDH yang dilaksanakan	%	100	8.606.029.201,77		8.842.587.159,63		9.551.056.853,10	26.999.673.214,50	SEKRETARIAT DAERAH

[illegible]

		Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya	%	100							BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100							BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja									BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan									BAPPEDA dan LITBANG
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Penjabaran konsistensi Program RPJMD ke dalam RPKD	%	100	2.467.436.093,05	2.535.259.665,30	2.738.385.131,35	7.741.080.889,71			BAPPEDA dan LITBANG
		2. Penjabaran konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	%	100	0,00	0,00	0,00	-			BAPPEDA dan LITBANG
		3. Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	0,00	0,00	0,00	-			BAPPEDA dan LITBANG
		4. Persentase Tersedianya data informasi komposit	%	100				-			BAPPEDA dan LITBANG
5.01.03	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	Persentase Program RKPD bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang sesuai dengan Program RPJMD	%		385.468.948,46	396.064.514,10	427.797.275,09	1.209.330.737,65			BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan APBD	%		0,00	0,00	0,00	-			BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang terakomodir dalam RKPD	%		0,00	0,00	0,00	-			BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil data bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	%								BAPPEDA dan LITBANG
5.01.04	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Program RKPD bidang Perekonomian dan SDA yang sesuai dengan Program RPJMD	%		701.757.426,25	721.046.961,50	778.817.375,36	2.201.621.763,12			BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang Perekonomian dan SDA dengan APBD	%		0,00	0,00	0,00	-			BAPPEDA dan LITBANG

		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan bidang perekonomian dan SDA yang terakomodir dalam RKPD	%		0,00		0,00		0,00		-	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil data bidang perekonomian dan SDA yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	%									BAPPEDA dan LITBANG
5.01.05	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	Persentase Program RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan SDA yang sesuai dengan Program RPJMD	%		1.827.706.301,03		1.877.945.320,67		2.028.406.641,74		5.734.058.263,45	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase kesesuaian kegiatan RKPD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dengan APBD	%		0,00		0,00		0,00		-	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase usulan kegiatan musrenbang kecamatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terakomodir dalam RKPD	%		0,00		0,00		0,00		-	BAPPEDA dan LITBANG
		Persentase hasil data bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah	%									BAPPEDA dan LITBANG
<b>5.02</b>	<b>KEUANGAN</b>											
	<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>											<b>BADAN KEUANGAN DAERAH</b>
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	4.797.179.755,64		4.929.042.083,76		5.323.957.833,10		15.050.179.672,50	BADAN KEUANGAN DAERAH
		1. Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	%	100	0		0		0		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			0		0		0		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		1. Persentase Aparatur yang mendapatkan peningkatan kapasitasnya	%	100	0		0		0		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			0		0		0		-	BADAN KEUANGAN DAERAH
		1. Persentase jumlah laporan yang terpenuhi	%	100	0		0		0		-	BADAN KEUANGAN DAERAH

		2. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan									BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah	%	86	7.830.824.692,94	8.046.074.241,16	8.690.727.174,56	24.567.626.108,66		BADAN KEUANGAN DAERAH	
		2. Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja								BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1. Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah	%	100	1.644.754.302,83	1.689.964.435,16	1.825.364.693,45	5.160.083.431,45		BADAN KEUANGAN DAERAH	
		2. Meningkatnya jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah								BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Tanah Milik Pemkot yang bersertifikat								BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya besaran PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD			894.832.719,24	919.429.405,56	993.094.256,96	2.807.356.381,76		BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Meningkatnya pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi daerah								BADAN KEUANGAN DAERAH	
5.03	KEPEGAWAIAN										
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	%	100	546.292.158,60	561.308.347,18	606.280.474,18	1.713.880.979,96		BKPSDM	
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	100	200.437.409,14	205.946.926,14	222.447.431,36	628.831.766,63			
		Persentase aparatur yang meningkat kapasitasnya	%	100	105.204.585,12	108.096.392,86	116.757.095,54	330.058.073,51			
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan	%	100	61.406.004,66	63.093.900,29	68.148.995,07	192.648.900,03			
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik	%	85	1.773.924.186,78	1.822.684.872,24	1.968.718.716,12	5.565.327.775,14		BKPSDM	
		Nilai IKM Pelayanan Kepegawaian	Nilai	75							
		Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi									
		Persentase pegawai dengan penilaian prestasi kerja baik									

5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen penataan sistem manajemen SDM)	Nilai	62,5	1.805.039.087,98	1.854.655.043,32	2.003.250.343,13	5.662.944.474,43	BKPSDM		
		Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	61,5							
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH								BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH		
5.05.01.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1. Persentase dokumen perencanaan yang digunakan dalam perenanaan pembangunan daerah	%	100	1.351.621.807,72	1.388.774.469,78	1.500.043.333,19	4.240.439.610,69	BAPPEDA dan LITBANG		
		2. Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	20					BAPPEDA dan LITBANG		
		3. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	20					BAPPEDA dan LITBANG		
		4. Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	20					BAPPEDA dan LITBANG		
		5. Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20					BAPPEDA dan LITBANG		
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%						BAPPEDA dan LITBANG		
		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	%						BAPPEDA dan LITBANG		
								-	BAPPEDA dan LITBANG		
5.06	PENGHUBUNG										
5.07	PENGELOAAN PERBATASAN										
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN										
6.01	INSPEKTORAT DAERAH										
	INSPEKTORAT										



[illegible]

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1077242838		1106853517		1195534822		3.379.631.176,51	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100	0		0		0		-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100	0		0		0		-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	0		0		0		-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%	100	0		0		0		-	KECAMATAN BUKIT INTAN
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%	100	0		0		0		-	KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Indeks kepuasan masyarakat		4	7.498.826.486,23		7.704.950.244,16		8.322.272.260,80		23.526.048.991,19	KECAMATAN BUKIT INTAN
		2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	85								KECAMATAN BUKIT INTAN
		3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	80								KECAMATAN BUKIT INTAN
		4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	80								KECAMATAN BUKIT INTAN
		5. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%									KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%								-	KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										-	KECAMATAN BUKIT INTAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										-	KECAMATAN BUKIT INTAN
	KECAMATAN RANGKUI											KECAMATAN RANGKUI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1.026.339.753,49		1.054.551.235,28		1.139.042.072,29		3.219.933.061,05	KECAMATAN RANGKUI
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100								KECAMATAN RANGKUI
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100								KECAMATAN RANGKUI
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	laporan	5								KECAMATAN RANGKUI
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja	%		0		0		0		-	KECAMATAN RANGKUI

		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	%							-	KECAMATAN RANGKUI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	%	80	8.545.190.939,08		8.780.076.607,10		9.483.537.943,71	26.808.805.489,88	KECAMATAN RANGKUI
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan									KECAMATAN RANGKUI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun								-	KECAMATAN RANGKUI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-	KECAMATAN RANGKUI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									-	KECAMATAN RANGKUI
	KECAMATAN GERUNGGANG										KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.001.836.280,22		1.029.374.223,56		1.111.847.873,80	3.143.058.377,58	KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100							KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100							KECAMATAN GERUNGGANG
		Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	dokumen	7							KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja									KECAMATAN GERUNGGANG
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan								1.029.374.223,56	KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	%	100	6.578.778.690,81		6.759.612.663,81		7.301.194.061,36	20.639.585.415,98	KECAMATAN GERUNGGANG
		2. Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun	%								KECAMATAN GERUNGGANG
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan									KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun								-	KECAMATAN GERUNGGANG
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									-	KECAMATAN GERUNGGANG

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										-	KECAMATAN GERUNGANG
	KECAMATAN TAMAN SARI											KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	1.072.132.831,48		1.101.603.049,07		1.189.863.685,97		3.363.599.566,52	KECAMATAN TAMAN SARI
		1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100								KECAMATAN TAMAN SARI
		2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik										KECAMATAN TAMAN SARI
		1. Persentase terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100								KECAMATAN TAMAN SARI
		2. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur										KECAMATAN TAMAN SARI
		1. Jumlah Laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	dokumen	7								KECAMATAN TAMAN SARI
		2. Meningkatnya ketepatan waktu penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan									-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase kelurahan yang menyelenggarakan pemerintahan yang baik	%	100	5.513.023.847,84		5.664.562.918,01		6.118.408.730,52		17.295.995.496,36	KECAMATAN TAMAN SARI
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan									-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun									-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										-	KECAMATAN TAMAN SARI
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										-	KECAMATAN TAMAN SARI
	KECAMATAN PANGKALBALAM											KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhiya kebutuhan Administrasi Perkantoran	%	100	942.304.365,33		968.205.927,03		1.045.778.762,21		2.956.289.054,57	KECAMATAN PANGKALBALAM
		Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100								KECAMATAN PANGKALBALAM

		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100								KECAMATAN PANGKALBALAM
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100								KECAMATAN PANGKALBALAM
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja										KECAMATAN PANGKALBALAM
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan								-		KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	%	40	5.642.848.235,09		5.797.955.849,03		6.262.489.127,47		17.703.293.211,58	KECAMATAN PANGKALBALAM
		2. Persentase waktu pelayanan administrasi tepat waktu	%	40								KECAMATAN PANGKALBALAM
		3. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	40								KECAMATAN PANGKALBALAM
		4. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%	40								KECAMATAN PANGKALBALAM
		Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan Publik di Kecamatan										KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase sarana dan prasarana publik yang terbangun									-	KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										-	KECAMATAN PANGKALBALAM
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM										-	KECAMATAN PANGKALBALAM
	KECAMATAN GIRIMAYA											KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	1.005.061.017,48		1.032.687.600,68		1.115.426.719,30		3.153.175.337,46	KECAMATAN GIRIMAYA
		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	%	100								KECAMATAN GIRIMAYA
		Terpenuhinya kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	100								KECAMATAN GIRIMAYA
		Nilai Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100								KECAMATAN GIRIMAYA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan kinerja										KECAMATAN GIRIMAYA
		Persentase ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan									-	KECAMATAN GIRIMAYA
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase Sarana dan Prasarana Publik Yang Terbangun	%	40	5.580.094.589,50		5.733.477.264,58		6.192.844.507,09		17.506.416.361,18	KECAMATAN GIRIMAYA

[illegible]

8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	70	728.787.131,45		748.819.644,87		808.815.211,18		2.286.421.987,50	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur 75%	%	75								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 75%	%	75								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		nilai laporan capaian kinerja keuangan 30 Lap	Skor/Peringkat	25								BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan	%	70	111.242.762,07		114.300.544,01		123.458.324,41		349.001.630,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		persentase Aparatur Yang Menaati Peraturan Yang Berlaku										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi 70%	%	70	271.418.921,17		278.879.540,26		301.223.419,81		851.521.881,23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase terdatanya kegiatan politik di daerah										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Jumlah kegiatan Ormas/LSM/LNL			0,00		0,00		0,00		-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1. Persentase pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan 70%	%	70	1.131.445.793,55		1.162.546.374,33		1.255.689.801,54		3.549.681.969,43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		2. Koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	persentase Aparatur Yang Mengikuti Diklat/Pelatihan/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			39.085.294,78		40.159.650,60		43.377.249,12		122.622.194,49	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		Persentase konflik sosial yang dapat diselesaikan										BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GRAND TOTAL					535.223.530.000,00		549.935.470.000,00		593.996.400.000,00		1.679.155.400.000,00	